

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor kebijakan Renstra yang saling berintegrasi satu dengan lainnya. Oleh karena itu suatu Kewajiban Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah dalam mewujudkan Visi, Misi, Program dan kemudian ditindak lanjuti pada Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan Satuan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai perangkat otonomi daerah yang mempunyai visi dan misi sesuai kompetensi yang dimiliki serta koheren dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melaksanakan visi dan misi sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana kerja (Renja) yang dilaksanakan pada setiap tahunnya dalam rangka mengukur kinerja Organisasi dan sebagai tindak lanjut penjabaran dari Rencana Strategis Jangka Menengah (Lima Tahunan) yang capaian kinerjanya diukur setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja SKPD ditindak lanjuti dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya dan selanjutnya diproses dalam penyusunan RAPBD.

Target kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2020 ini, menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja unit satuan kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran kinerja/keberhasilan unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kinerja.

Sedangkan Rencana Kinerja pada Tahun 2020 bagi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan komitmen dan kontrak kerja yang harus dioptimalkan dalam proses pencapaian kinerjanya, sebagai bagian dari upaya pencapaian target kinerja, Rencana Strategis serta visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada Umumnya.

Dalam perkembangannya rencana kinerja yang telah disusun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

## **I.2. Landasan Hukum**

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) khususnya lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan.

### **I.4. Sistematika Penulisan**

#### **BABI P E N D A H U L U A N**

##### **I.1. Latar Belakang**

- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV P E N U T U P**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2019 sebagai bahan pembandingan pada pelaksanaan Renja tahun 2018, dimana pada tahun 2018 pelaksanaan Renja SKPD capaian prosentasenya sekitar 91 persen dan berdasarkan realisasi anggaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa ada pencapaian yang tidak mencapai optimalisasi atau serapan anggaran belum maksimal. Hal ini disebabkan terjadinya pertanggungjawaban keuangan SKPD yang terlambat, dengan demikian akan mempengaruhi pelaksanaan renja sebagaimana telah ditetapkan pada awal perencanaan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seyogyanya ditempuh langkah-langkah strategis yakni dengan memberikan arahan dan petunjuk serta memotivasi SDM agar dapat memacu serapan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan.

Disamping itu adanya penyesuaian program berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat meningkatkan capaian prosentase pelaksanaan Renja SKPD pada tahun 2018 dengan target sebesar 99,90 %. Sebagai bahan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASILPELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI s.d. TAHUN 2019**  
**KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG**

Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. dengan tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s.d. tahun berjalan (2019)	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)</b>	100%					100		
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	190	190	190	190	100,0%	190	50	26%
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah daya Listrik yang digunakan (kwh)	150.000	36	1250	12	1,0%	30000	7500	5%
01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Jumlah Kendaraan yang diasuransikan	5	3	1	1	100,0%	1	1	20%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa perizinan	55	50	15	1	6,7%	11	3	5%
01.07	Penyediaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang dibuat	1000	36	200	200	100,0%	12	85	9%
01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang digunakan dan lamanya bekerja	240	144	48	48	100,0%	48	24	10%
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah & jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	245	120	40	0	0,0%	45	22	9%
01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilaksana-kan	285	150	50	50	100,0%	40	20	7%
01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke d Daerah yang dilaksalamna-kan	1200	300	100	100	100,0%	200	15	1%
01.20	Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran	Jumlah dokumen perkantoran yang dihasilkan	750	450	150	150	100,0%	150	65	9%
<b>02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)</b>	100%					100%		0%
02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan (unit)	16							0%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	8	3				0		0%
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	17					3	3	18%
02.10	Pengadaan meubiler	Jumlah dan meubiler yang diadakan (unit)	10							0%
02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	5	3	1	1	100,0%	1	1	20%
02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg dipelihara rutin/berkala (unit)	63	45	11	11	100,0%	12	5	8%
02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	75	45	15	15	100,0%	15	5	7%
02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	100	75	22	15	68,2%	14	4	4%
<b>03.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang memenuhi kriteria kedisiplinan pegawai (%)</b>	95%	-				95		0%
03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian seragam dinas dan perlengkapannya yang diadakan (setel)	40						1	3%



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan (setel)	40	0	0	0	0,0%	0		0%
<b>06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase capaian kinerja keuangan (%)</b>	100%	-				100%		0%
06.01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat (buah)	20	12	4	4	100,0%	3		0%
<b>1.15.01.</b>	<b>Bidang Koperasi</b>									#DIV/0!
<b>18.</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi</b>	<b>Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (%)</b>	<b>14%</b>					9		0%
18.02	Pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang dibina/ diawasi dalam hal tertib organisasi dan usaha (unit)	213	40	35	35	100,0%	39	20	9%
18.01	Pembinaan/bimbingan teknis laporan keuangan koperasi dan pelaksanaan RAT	Jumlah kop yg dilatih membuat laporan keuangan (unit)	80	0	0	0	0%	0		0%
18.03	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang prinsip perkoperasian (orang)	480	0	0	0	-			0%
<b>16</b>	<b>Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Persentase UMK terhadap total UMKM (%)</b>	<b>87%</b>					95%		0%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
16.04	Workshop pengembangan usaha mikro dan kecil melalui inovasi desain dan kemasan	Jumlah UMKM yang dilatih meningkatkan desain produknya (unit)	95	-	0 %	0 %	0 %			0%
16.01	Pembangunan rumah kemasan	Jumlah Rumah kemasan dan perlengkapannya yang terwujud (unit)	1	-	0 %	0 %	0 %			0%
16.03	Penciptaan usaha baru dan penghar-gaan wira-usaha	WUB yg tercipta (orang)	1370	-	0,45%	0%	0%	50		0%
16.05	Peningkatan Sarana produksi UMKM	Jumlah sarana yang diserahkan (unit)	3350					550	500	15%
16.06	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah pameran yang diikuti	4	26,00%	35,00%	35,00%	100,00%			0%
16.02	Reinventarisasi data UMKM	Data UMKM yang akurat (buku)	4							0%
										#DIV/0!
	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>									#DIV/0!
<b>16</b>	<b>Program Peningkatan kesempatan kerja</b>	<b>Besaran pencari kerja yang ditempatkan (%)</b>	<b>95,70%</b>					50		0%
16.01	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan informasi lowongan kerja (org)	2090	60,00%	20	0%	0%	0		0%
16.02	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Jumlah perencanaan (buku) BLK yang berdiri (unit)	1 buku 1 unit							#VALUE!
16.03	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih (org)	5950	60,00%	80,00%	80,00%	100%	850	600	10%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>17</b>	<b>Program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan</b>	<b>Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan ketenagakerjaan (%)</b>	<b>100,00%</b>	-				87%		0%
17.01	Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja	Besaran pemeriksaan perusahaan (%)	100%	60,00%	80,00%		0%	28,00%	8,00%	8%
17.02	Perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga honorer Pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan (orang)	24.720							0%
15.03	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	<b>Persentase transmigrasi swakarsa (%)</b>	<b>11,1%</b>					6%		0%
15.04	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah transmigran yg terdampak pengembangan melalui peningkatan kerjasama (KK)	900	60%	80%	80%	100%	175		0%
15.05	Penyediaan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang mendapat bantuan (KK)	900	60%	80%	0	0%	100		0%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=(7/6)</i>	<i>9</i>	<i>10=(5+7+9)</i>	<i>11=(10/4)</i>
15.02	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah Warga Transmigrasi Yang dilatih (KK)	725							0%
15.01	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen perencanaan yg terwujud (buah)	6							0%
15.03	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Jumlah transmigran baru yang tertampung (KK)	200							0%

## **II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Secara kelembagaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah. Untuk mengukur Kinerja Pelayanan SKPD, maka dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis Lingkungan Strategis, Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diembang oleh lembaga Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD, memerlukan :

### **II.1.1. Lingkungan Strategis**

Pengertian Lingkungan Strategis adalah faktor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Organisasi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Lingkungan Strategis dibagi dua yaitu Instrumental Input dan Enviromental Input. Enveromental Input berkaitan dengan kebijakan atau Political Will dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah melainkan disiasati apabila berbentuk ancaman. Demikian pula dengan lingkungan strategis dianalisis berdasarkan instrumental serta emvironmental input.

### **II.1.2. Analisa Lingkungan Intenal**

Lingkungan Internal merupakan Variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kinerja pada Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam batas-batas tertentu yang dapat

dikendalikan dalam rangka mewujudkan visi Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Selain itu, tersedianya Sumber Daya Manusia/Aparatur serta Sumber Daya Material berupa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi saat ini, meskipun masih jauh memadai, namun tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan dukungan dan motivasi kerja aparatur yang bertugas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

### **II.1.3. Analisa Lingkungan Eksternal**

Lingkungan Eksternal Satuan Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah salah satu Variabel yang turut mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja aparatur, akan tetapi pengelolaan atau pengendaliannya diluar kendali Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, jika faktor lingkungan eksternal ini mempunyai pengaruh atau berdampak negatif terhadap optimalisasi pencapaian kinerja aparatur maka harus dapat disiasati dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan kinerja unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan cara menyikapi desentralisasi kewenangan dalam hal pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal Pembangunan dan secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2  
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
<b>I.</b>	<b>SEKRETARIAT</b>											
	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)</b>				100	100	100			100	100	
1.	Jumlah dokumen yang bermaterai			190	190			190	50			
2.	Jumlah daya Listrik yang digunakan (kwh)			1250	30000	30000	30000	12	7500	30000	30000	
3.	Jumlah Kendaraan yang diasuransikan			1	1	1	1	1	1	1	1	
4.	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa perizinan			15	11	11	11	1	3	11	11	
5.	Jumlah dokumen keuangan yang dibuat			200	12	12	12	200	85	12	12	
6.	Jumlah tenaga kebersihan yang digunakan dan lamanya bekerja			48	48	48	48	48	24	48	48	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
7.	Jumlah & jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			40	45	45	45	0	22	45	45	
8.	Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilaksanakan			50	40	50	60	50	20	50	60	
9.	Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke d Daerah yang dilaksalamna-kan			100	200	250	250	100	15	250	250	
10.	Jumlah dokumen perkantoran yang dihasilkan			150	150	150	150	150	65	150	150	
	<b>Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)</b>				100%	100%	100%			100%	100%	
<i>11</i>	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan (unit)						6				6	
<i>12</i>	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)				0							
						2	2			2	2	



<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
13	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)			0	3	5	3		3	5	3	
14	Jumlah dan meubiler yang diadakan (unit)			0		10				10		
15	Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)			0	1	1	1	1	1	1	1	
16	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg dipelaha-ra rutin/berkala (unit)			0	12	12	12	11	5	12	12	
17	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)			1	15	15	15	15	5	15	15	
18	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)			11	14	17	22	15	4	17	22	
	<b>Persentase ASN yang memenuhi kriteria kedisiplinan pegawai (%)</b>			15	95	95%	96%			95%	96%	
19	Jumlah pakaian seragam dinas dan perlengkapannya yang diadakan (setel)			22		0	40		1	0	40	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
20	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan (setel)				0	0	40	0		0	40	
	<b>Persentase capaian kinerja keuangan (%)</b>			0	100%	100%	100%			100%	100%	
21	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPd yang dibuat (buah)			0	3	4	4	4		4	4	
	<b>Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (%)</b>			4	9	10	11			10	11	
22	Jumlah koperasi yang dibina/ diawasi dalam hal tertib organisasi dan usaha (unit)				39			35	20			
						40	42			40	42	
23	Jumlah kop yg dilatih membuat laporan keuangan (unit)				0	20	20	0		20	20	
<b>II.</b>	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang prinsip perkoperasian (orang)					120	120	0		120	120	
24	<b>Persentase UMK terhadap total UMKM (%)</b>				95%	93%	91%	-		93%	91%	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
25	Jumlah UMKM yang dilatih meningkatkan desain produknya (unit)					20	25	0 %		20	25	
26	Jumlah Rumah kemasan dan perlengkapannya yang terwujud (unit)					1	1	0 %		1	1	
27	WUB yg tercipta (orang)				50	50	50	0%	500	50	50	
28	Jumlah sarana yang diserahkan (unit)				550	700	700			700	700	
29	Jumlah pameran yang diikuti					1	1	35,00%		1	1	
30	Data UMKM yang akurat (buku)					1	1		-	1	1	
	<b>Besaran pencari kerja yang ditempatkan (%)</b>				50	62,50%	70,80%		8,57%	62,50%	70,80%	
31	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan informasi lowongan kerja (org)				0	450	495	0%		450	495	
32	Jumlah perencanaan (buku) BLK yang berdiri (unit)					1	1			1	1	
39	Jumlah pencari kerja yang dilatih (org)				850	1000	1200	80,00%	600	1000	1200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan ketenagakerjaan (%)</b>				87%	90,90%	94,80%			90,90%	94,80%	
40	Besaran pemeriksaan perusahaan (%)				28,00%	46,00%	60,00%		8,00%	46,00%	60,00%	
41	Jumlah tenaga honorer Pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan (orang)					4900	4950			4900	4950	
	<b>Persentase transmigrasi swakarsa (%)</b>				6%	11,10%	23,90%			11,10%	23,90%	
42	Jumlah transmigran yg terdampak pengembangan melalui peningkatan kerjasama (KK)				175	100	250	80%		100	250	
43	Jumlah transmigran yang mendapat bantuan (KK)				100	175	200	0		175	200	
44	Jumlah Warga Transmigrasi Yang dilatih (KK)					50	100			50	100	
45	Jumlah dokumen perencanaan yg terwujud (buah)					3	3			3	3	
46	Jumlah transmigran baru yang tertampung (KK)					175	300			175	300	

### II.3. Isu -Isu Penting Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk merumuskan isu-isu strategis dalam memproyeksikan kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats). Isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas Organisasi. Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan, agar memudahkan dalam mengorganisir isu, maka dilakukan identifikasi. Hasil identifikasi isu dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini ;

#### Matriks Internal Strategi Faktor Analisis Sistem

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Adanya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang</li><li>➤ Adanya komitmen dan motivasi kerja yang tinggi, dikalangan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Jumlah Aparatur Pembina Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim.</li><li>➤ Sarana Prasarana Kerja dalam rangka pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, relatif masih kurang memadai.</li></ul>

### Matriks Eksternal Strategi Faktor Analisis Sistem

Peluang (O)	Ancaman (T)
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya Komitmen yang kuat dari Pemimpin Daerah untuk mewujudkan visi sebagai Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri yang mandiri berbudaya dan religius</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Krisis ekonomi global yang berdampak pada tata niaga dan daya saing produk industri lokal serta tumbuh kembangnya Koperasi dan Usaha baru</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dalam rangka usaha peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terbatasnya daya serap Koperasi dan UMKM memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih luasnya lahan untuk dijadikan daerah transmigrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingginya angka usia kerja yang menuntut terciptanya lapangan kerja baru.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya struktur masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan serta budaya kerja yang ulet dan religius (Megetteppa na malempu).</li> </ul>	

#### II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD sangat dibutuhkan dalam merumuskan perencanaan baik pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang matang dan tentunya bermamfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sistem Perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dikenal dengan adanya Perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) artinya memungkinkan menggali ide-ide dan gagasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan. Sistem perencanaan dengan metode tersebut dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Perencanaan metode dari atas ke bawah (top down planning) untuk memungkinkan terjadinya perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan Keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan terjadinya proses tersebut, maka kita membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 3  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020  
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>				<b>10.925.500.000</b>	<b>DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>				<b>10.925.500.000</b>	
	<b>SEKRETARIAT :</b>				<b>1.028.500.000</b>	<b>SEKRETARIAT :</b>				<b>1.028.500.000</b>	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)</b>	100%	<b>806.500.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)</b>	100%	<b>806.500.000</b>	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Sidrap	Jumlah dokumen yang bermaterai			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Sidrap	Jumlah dokumen yang bermaterai			
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kab Sidrap	Jumlah daya Listrik yang digunakan (kwh)	30.000	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kab Sidrap	Jumlah daya Listrik yang digunakan (kwh)	30.000	50.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Kab Sidrap	Jumlah Kendaraan yang diasuransikan	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Kab Sidrap	Jumlah Kendaraan yang diasuransikan	1	5.000.000	
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Sidrap	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa perizinan	11	7.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Sidrap	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa perizinan	11	7.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Penyediaan administrasi keuangan	Kab Sidrap	Jumlah dokumen keuangan yang dibuat	200	140.000.000	Penyediaan administrasi keuangan	Kab Sidrap	Jumlah dokumen keuangan yang dibuat	200	140.000.000	
6.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah tenaga kebersihan yang digunakan dan lamanya bekerja	48	40.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah tenaga kebersihan yang digunakan dan lamanya bekerja	48	40.000.000	
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah & jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	45	2.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah & jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	45	2.000.000	
8.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilaksanakan	50	250.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilaksanakan	50	250.000.000	
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dalam Kab. Sidrap	Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke d Daerah yang dilaksanakan	250	12.500.000	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dalam Kab. Sidrap	Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke d Daerah yang dilaksanakan	250	12.500.000	
10.	Pelayanan Adminsitasi Perkantoran	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dokumen perkantoran yang dihasilkan	150	300.000.000	Pelayanan Adminsitasi Perkantoran	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dokumen perkantoran yang dihasilkan	150	300.000.000	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)</b>	100%	<b>292.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)</b>	100%	<b>292.000.000</b>	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
<i>11</i>	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan (unit)	1	50.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan (unit)	1	50.000.000	
<i>12</i>	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	2	20.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	2	20.000.000	
<i>1</i>	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	5	50.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	5	50.000.000	
<i>13</i>	Pengadaan meubiler	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan meubiler yang diadakan (unit)	10	50.000.000	Pengadaan meubiler	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan meubiler yang diadakan (unit)	10	50.000.000	
<i>14</i>	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	1	52.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	1	52.000.000	
<i>15</i>	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg dipelihara rutin/berkala (unit)	<i>12</i>	52.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg dipelihara rutin/berkala (unit)	<i>12</i>	52.000.000	
<i>16</i>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	<i>15</i>	<i>7.500.000</i>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	<i>15</i>	<i>7.500.000</i>	
<i>17</i>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	<i>17</i>	<i>10.500.000</i>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	<i>17</i>	<i>10.500.000</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase ASN yang memenuhi kriteria kedisiplinan pegawai (%)</b>	95%	-	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase ASN yang memenuhi kriteria kedisiplinan pegawai (%)</b>	95%	-	
18	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah pakaian seragam dinas dan perlengkapannya yang diadakan (setel)	0	-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah pakaian seragam dinas dan perlengkapannya yang diadakan (setel)	0	-	
19	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pangkajene Sidenreng	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan (setel)	0	-	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pangkajene Sidenreng	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan (setel)	0	-	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase capaian kinerja keuangan (%)</b>	100%	<b>30.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase capaian kinerja keuangan (%)</b>	100%	<b>30.000.000</b>	
20	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat (buah)	4	30.000.000	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat (buah)	4	30.000.000	
	<b>BIDANG KOPERASI :</b>				<b>300.000.000</b>	<b>BIDANG KOPERASI :</b>				<b>300.000.000</b>	
	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi</b>		<b>Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (%)</b>	<b>10%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi</b>		<b>Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (%)</b>	<b>10%</b>	<b>300.000.000</b>	
21	Pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Kab Sidrap	Jumlah koperasi yang dibina/ diawasi dalam hal tertib organisasi dan usaha (unit)	40	110.000.000	Pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Kab Sidrap	Jumlah koperasi yang dibina/ diawasi dalam hal tertib organisasi dan usaha (unit)	40	110.000.000	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Pembinaan/bimbingan teknis laporan keuangan kope-rasi dan pelaksanaan RAT	Kab Sidrap	Jumlah kop yg dilatih membuat laporan keuangan (unit)	20	70.000.000	Pembinaan/bimbingan teknis laporan keuangan kope-rasi dan pelaksanaan RAT	Kab Sidrap	Jumlah kop yg dilatih membuat laporan keuangan (unit)	20	70.000.000	
23	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Kab Sidrap	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang prinsip perkoperasian (orang)	120	120.000.000	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Kab Sidrap	Jumlah orang yg mendapatkan pemahaman tentang prinsip perkoperasian (orang)	120	120.000.000	
<b>II.</b>	<b>BIDANG UMKM :</b>				<b>4.690.000.000</b>	<b>BIDANG UMKM :</b>				<b>4.690.000.000</b>	
	<b>Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah</b>		<b>Persentase UMK terhadap total UMKM (%)</b>	<b>93%</b>	<b>4.690.000.000</b>	<b>Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah</b>		<b>Persentase UMK terhadap total UMKM (%)</b>	<b>93%</b>	<b>4.690.000.000</b>	
24	Workshop pengembangan usaha mikro dan kecil melalui inovasi desain dan kemasan	Sidrap	Jumlah UMKM yang dilatih meningkatkan desain produknya (unit)	20	20.000.000	Workshop pengembangan usaha mikro dan kecil melalui inovasi desain dan kemasan	Sidrap	Jumlah UMKM yang dilatih meningkatkan desain produknya (unit)	20	20.000.000	
25	Pembangunan rumah kemasan	Sidrap	Jumlah Rumah kemasan dan perlengkapannya yang terwujud (unit)	1	300.000.000	Pembangunan rumah kemasan	Sidrap	Jumlah Rumah kemasan dan perlengkapannya yang terwujud (unit)	1	300.000.000	
26	Penciptaan usaha baru dan penghar-gaan wira-usaha	Sidrap	WUB yg tercipta (orang)	330	1.100.000.000	Penciptaan usaha baru dan penghar-gaan wira-usaha	Sidrap	WUB yg tercipta (orang)	330	1.100.000.000	
27	Peningkatan Sarana produksi UMKM	Sidrap	Jumlah sarana yang diserahkan (unit)	700	3.000.000.000	Peningkatan Sarana produksi UMKM	Sidrap	Jumlah sarana yang diserahkan (unit)	700	3.000.000.000	
	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	regional /nasion al	Jumlah pameran yang diikuti	1	70.000.000	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	regional /nasion al	Jumlah pameran yang diikuti	1	70.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Reinventarisasi data UMKM	Sidrap	Data UMKM yang akurat (buku)	1	200.000.000	Reinventarisasi data UMKM	Sidrap	Data UMKM yang akurat (buku)	1	200.000.000	
	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>3.157.000.000</b>	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>3.157.000.000</b>	
	<b>Program Peningkatan kesempatan kerja</b>		<b>Besaran pencari kerja yang ditempatkan (%)</b>	<b>62,50 %</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>Program Peningkatan kesempatan kerja</b>		<b>Besaran pencari kerja yang ditempatkan (%)</b>	<b>62,50 %</b>	<b>2.300.000.000</b>	
29	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Sidrap	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan informasi lowongan kerja (org)	450	200.000.000	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Sidrap	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan informasi lowongan kerja (org)	450	200.000.000	
30	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Sidrap	Jumlah perencanaan (buku) BLK yang berdiri (unit)	1 buku	100.000.000	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Sidrap	Jumlah perencanaan (buku) BLK yang berdiri (unit)	1 buku	100.000.000	
31	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Sidrap	Jumlah pencari kerja yang dilatih (org)	1000	2.000.000.000	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Sidrap	Jumlah pencari kerja yang dilatih (org)	1000	2.000.000.000	
	<b>Program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan</b>	<b>Sidrap</b>	<b>Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan ketenagakerjaan (%)</b>	<b>90,90 %</b>	<b>857.000.000</b>	<b>Program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan</b>	<b>Sidrap</b>	<b>Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan ketenagakerjaan (%)</b>	<b>90,90 %</b>	<b>857.000.000</b>	
32	Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja	Sidrap	Besaran pemeriksaan perusahaan (%)	46%	57.000.000	Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja	Sidrap	Besaran pemeriksaan perusahaan (%)	46%	57.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan	Sidrap	Jumlah tenaga honorer Pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan (orang)	4.900	800.000.000	Perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan	Sidrap	Jumlah tenaga honorer Pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan (orang)	4.900	800.000.000	
	<b>Bidang Transmigrasi</b>				<b>1.750.000.000</b>	<b>Bidang Transmigrasi</b>				<b>1.750.000.000</b>	
	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>		<b>Persentase transmigrasi swakarsa (%)</b>	<b>11,1 %</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>		<b>Persentase transmigrasi swakarsa (%)</b>	<b>11,1%</b>	<b>1.750.000.000</b>	
34	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kec. Pitu Riase	Jumlah transmigran yg terdampak pengembangan melalui peningkatan kerjasama (KK)	100	300.000.000	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kec. Pitu Riase	Jumlah transmigran yg terdampak pengembangan melalui peningkatan kerjasama (KK)	100	300.000.000	
35	Penyediaan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Kec. Pitu Riase	Jumlah transmigran yang mendapat bantuan (KK)	175	350.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Kec. Pitu Riase	Jumlah transmigran yang mendapat bantuan (KK)	175	350.000.000	
36	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Kec. Pitu Riase	Jumlah Warga Transmigrasi Yang dilatih (KK)	50	100.000.000	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Kec. Pitu Riase	Jumlah Warga Transmigrasi Yang dilatih (KK)	50	100.000.000	
37	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kec. Pitu Riase	Jumlah dokumen perencanaan yg terwujud (buah)	3	400.000.000	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kec. Pitu Riase	Jumlah dokumen perencanaan yg terwujud (buah)	3	400.000.000	
38	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kec. Pitu Riase	Jumlah transmigran baru yang tertampung (KK)	175	600.000.000	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kec. Pitu Riase	Jumlah transmigran baru yang tertampung (KK)	175	600.000.000	

## **II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dikenal dua arah, yaitu Top Down Planning dan Bottom Up Planning, kedua Sistem tersebut sering digunakan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan untuk saling bersinergi satu dengan lainnya.

Dalam pelaksanaannya dilakukan setiap tahun sebagai penjabaran Pembangunan Lima Tahunan dan mulai dilakukan pada tingkat Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan) yang melibatkan Stakeholders, kemudian ditindaklanjuti pada tingkat kecamatan. Musrenbang tersebut kemudian dirumuskan pada tingkat Kabupaten sebagai Program Unit Kerja SKPD Tahunan, Pelaksanaan Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan dimaksudkan menampung aspirasi masyarakat sebagai pencerminan azas keadilan dan pemerataan, agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan disegala aspek secara berkesinambungan (sustainable).

Usulan Program masyarakat Desa/Kelurahan dapat kita tampung pada tingkat SKPD. Tidak semua usulan program masyarakat dapat diterima oleh karena tidak sejalan apa yang kita programkan dan terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan keterbatasan dana tersebut, kepada masyarakat Pelaku ekonomi lokal, baik Koperasi dan para pengusaha mikro dan kecil serta Wirausaha baru semua tetap dijalankan dengan menerapkan sistem prioritas dan paling dibutuhkan dan bersifat mendesak yang diutamakan dalam pembinaannya.

Berbicara lebih khusus pada Pembinaan Perkoperasian sebagai soko guru perekonomian memerlukan sarana dan prasarana, seperti bentuk

pelatihan dan pembinaan, disamping itu masyarakat tetap mengharapkan adanya bantuan perkuatan modal bagi Koperasi dan UMKM/IKM. Hal ini pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Koperasi dan UKM ditahun 2002 s/d 2005 yang di evaluasi dari Tahun ke tahun hingga tahun 2014, hasilnya tidak menunjukkan angka positif (+) bahkan banyak kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang diterima oleh petugas atau kolektor sehingga belum pernah terpenuhi permintaan pelaku ekonomi Lokal untuk pemberian modal usaha sebagai bentuk pengembangan usaha karena pemberian bantuan perkuatan modal Usaha bagi pelaku ekonomi Lokal periode 2002 s/d 2005, dengan demikian bunga 0,5 % per bulan selama jangka waktu 1 (satu) Tahun dianggap tidak berhasil.

Banyaknya jumlah Koperasi dan UMKM serta pelaku Industri Rumah Tangga (IKM ) tidak mengembalikan dana yang dipinjamkan yang selanjutnya akan digulirkan kembali, namun demikian pada kenyataannya beberapa Koperasi dapat tumbuh dan berkembang atas prakarsa Pengurus dan dukungan para anggota, walaupun berjalan lamban, kecuali Koperasi Pegawai Negeri Sipil yang terhimpun dalam KPRI yang memperlihatkan kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun yang tercermin dalam perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) sementara UMKM dan IKM senantiasa menunggu uluran tangan Pemerintah agar dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Perbankan atau memfasilitasi untuk melakukan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat pelaku bisnis dengan segala kemudahan rentang kendali pelayanan (Debirokrasi).



Tabel II. 4  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020

Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I.</b>	<b><i>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</i></b>					
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja					
1	Pelatihan dan Pengadaan Alat Cukur Rambut (Tersebar)	Kecamatan MaritengngaE	Terlaksananya pelatihan/pengadaan peralatan	12 Kelompok	75.000.000	Hasil Musrembang tahun 2019
2	Kurusus Tata Rias	Kelurahan Wala	sda	4 Kelompok	60.000.000	sda
3	Pelatihan Usaha Industri Kecil Rumah Tangga	Kelurahan Wala	Terlaksananya pelatihan	4 Kelompok	60.000.000	sda
4	Kursus Sablon	Kelurahan Wala	sda	4 Klp	60.000.000	sda
5	Pelatihan dan Pengadaan Alat Pertukangan	Lingkungan I dan II Kelurahan Majelling	Terlaksananya pelatihan/pengadaan peralatan	2 kelompok	70.000.000	sda
6	Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit	Lingkungan I dan II Kelurahan Majelling	sda	2 kelompok	70.000.000	sda
7	Pelatihan dan Pengadaan Tata Boga	Lingkungan I dan II Kelurahan Majelling	sda	2 kelompok	70.000.000	sda

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
8	Pelatihan dan Pengadaan Alat Menjahit Bagi Pemuda Kreatif	Kel. Baranti	sda	3 Paket	75.000.000	sda
9	Pelatihan & Pengadaan alat Kelompok Usaha Tata Boga	Kel. Baranti	sda	3 Paket	75.000.000	sda
10	Pelatihan & Pengadaan alat Kelompok Usaha Perbengkelan	Kel. Baranti	sda	3 Paket	75.000.000	sda
11	Pelatihan dan Pengadaan Alat Menjahit Bagi Pemuda Kreatif	Desa Tonronge	sda	10 klp	70.000.000	sda
12	Pelatihan dan Pengadaan Alat Menjahit Bagi Pemuda Kreatif	Kel. Duampanua	sda	5 klp	70.000.000	sda
13	Pelatihan dan Pengadaan Alat Menjahit Bagi Pemuda Kreatif	Desa Tonrong Rijang	sda	5 klp	70.000.000	sda
14	Pelatihan dan Pengadaan Alat Menjahit Bagi Pemuda Kreatif	Kel. Benteng	sda	1 klp	50.000.000	sda
15	Pelatihan & Pengadaan Alat Pertukangan	Lingkungan Benteng & Callaccu, Kel. Benteng	sda	1 klp	50.000.000	sda
16	Pelatihan dan Pengadaan Alat Menjahit Bagi Pemuda Kreatif	Desa Passeno	sda	1 klp	50.000.000	sda
17	Pelatihan dan Pengadaan Alat Menjahit Bagi Pemuda Kreatif	Kel. Manisa	sda	1 klp	50.000.000	sda
18	Pelatihan dan Pengadaan Alat Menjahit Bagi Pemuda Kreatif	Desa Sipodeceng	sda	1 klp	50.000.000	sda
19	Pelatihan Kelompok Tata Boga dan Pengadaan Alat	Desa Kulo	sda	4 Klp	20.000.000	sda
20	Pelatihan dan Pengadaan Alat Tata Boga	Kelurahan Lalebata	sda	1 Kelompok	75.000.000	sda

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
21	Pelatihan dan Pengadaan Alat Tata Boga	Kelurahan Kadidi	sda	1 Kelompok	75.000.000	sda
22	Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit	Kelurahan Rappang	sda	1 Kelompok	75.000.000	sda
23	Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit	Kelurahan Maccorawalie	sda	4 kelompok	300.000.000	sda
24	Pelatihan dan Pengadaan Alat Tata Rias Klpk Tata Rias Asma	Lingk. Makkawarue RK 1 Kadidi,	sda	1 klp	35.000.000	sda
25	Pelatihan dan Pengadaan Alat Perbengkelan Klpk Bengkel Wa Tato dan Klpk Bengkel Mahyudin	Jl. Poros Kadidi - Rappang,	sda	2 klp	70.000.000	sda
26	Pelatihan dan Pengadaan Alat Pertukangan Klpk Pertukangan Launtu dan Klp Pertukangan Jasman	Jl. Laupe, Kadidi	sda	3 klp	100.000.000	sda
27	Pelatihan dan Pengadaan Tata Boga	Lingkungan I dan II Kel Baula		1 Kelompok	30.000.000	sda
28	Pelatihan dan Pengadaan Tata Rias	Lingkungan I dan II Kel Baula		2 Kelompok	70.000.000	sda
29	Pelatihan dan Pengadaan Mesin jahit	Lingkungan I dan II Kel Massepe		2 klp	70.000.000	sda
30	Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit	Lingkungan I & II Kel Pajalele	sda	6 Kelompok	210.000.000	sda
31	Pelatihan dan Pengadaan Perlengkapan Pandai Besi	Lingkungan I & II Kel Pajalele	sda	2 Kelompok	70.000.000	sda
32	Pelatihan dan Pengadaan Alat Tata Rias	Desa Polewali	sda	1 Kelompok	35.000.000	sda
33	Pelatihan dan Pengadaan Tata Boga	Dusun I & II Desa Teteaji	sda	3 Klp	75.000.000	sda
34	Pelatihan dan Pengadaan Mesi Jahit	tersebar di Kec. Watang Pulu	sda	5 Kelompok	150.000.000	sda

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
35	Pelatihan Kelompok Menjahit dan Bantuan Mesin	Batu Pute Kel. Bangkai	sda	20 orang	50.000.000	sda
36	Pelatihan dan pengadaan mesin jahit	Dusun II Mattiro Desa Ciro-CiroE	sda	2 kelompok	50.000.000	sda
37	Pelatihan Kursus Menjahit dan Pengadaan Alat	Dusun I, II dan III Desa BuaE	sda	3 Kelompok	75.000.000	sda
38	Pelatihan Tata Boga	Lingk. 1 & Lingk. 2 Kelurahan Lawawoi	Terlaksananya pelatihan	2 klp	30.000.000	sda
39	Pelatihan Industri Rumah Tangga	Dusun I, II dan III Desa BuaE	sda	3 klp	45.000.000	sda
40	Pelatihan Kursus Kecantikan dan Pengadaan Alat	Dusun I, II dan III Desa BuaE	Terlaksananya pelatihan/pengadaan peralatan	3 klp	75.000.000	sda
41	Pelatihan Tata Boga ( Pembuatan Kue )	Kel.Sidenreng,Kec.Watang Sidenreng	Terlaksananya pelatihan	5 klp	75.000.000	sda
42	Pelatihan Menjahit Tingkat Kelurahan	Lk. II Kelurahan Lancirang	sda	1 Kelompok	15.000.000	sda
43	Pelatihan dan Pengadaan Alat Kelompok Tata Boga	Desa Ajubbisue	Terlaksananya pelatihan/pengadaan peralatan	3 Kelompok	75.000.000	sda
44	Pelatihan dan Pengadaan Alat Menjahit ( Klp Widya dan Wanita Karya)	Bulucenrana	sda	2 kelompok	50.000.000	sda
45	Pelatihan dan Pengadaan Alat Kelompok menjahit	Desa Ajubbisue	sda	8 Kelompok	200.000.000	sda
46	Pelatihan Menjahit, Kecantikan dan Tata Boga	Kec. Watang Sidenreng	Terlaksananya pelatihan	3 Kelompok	45.000.000	Pokok-pokok pikiran DPRD
47	Pelatihan Menjahit, Kecantikan dan Tata Boga	Kec. MaritengngaE	sda	3 Kelompok	45.000.000	Pokok-pokok pikiran DPRD

1	2	3	4	5	6	7
II	<b>Program Pengembangan UMKM</b>					
	<b>Kegiatan Peningkatan sarana produksi UMKM</b>					
	Pengadaan Peralatan Pandai Besi	Kel. Duampanua	Meningkatnya sarana produksi UMKM	3 Kelompok	10.000.000	Hasil Musrembang tahun 2019
	Pengadaan Alat Pertukangan Kayu/Batu	Desa Tonrong Rijang	sda	1 Kelompok	10.000.000	sda
	Pengadaan mesin jahit klp Terkini	Panreng Rijang	sda	1 Kelompok	10.000.000	sda
	Pengadaan mesin jahit klp Mawar	Panreng Rijang	sda	1 Kelompok	10.000.000	sda
	Pengadaan Mesin Jahit Typical	Desa Kulo	sda	6 Klp	30.000.000	sda
	Pengadaan Spinner	Kel Lalebata	sda	3 klp	30.000.000	sda
	Pengadaan Oven Besar	Kel Lalebata	sda	5 klp	50.000.000	sda
	Pengadaan Penggiling Roti	Kel Lalebata	sda	3 klp	20.000.000	sda
	Pembinaan Produksi dan Penataan Lokasi Kuliner Tradisional Kue Apang	Kel. Batu Lappa dan Kel Lawawoi Kec. Watang Pulu	sda	2 Kelompok	200.000.000	sda
	Pengadaan alat pertukangan kayu dan batu	Dusun I Ciro-CiroE	sda	2 klp	20.000.000	sda
	Pengadaan Mesin Jahit	Kel. Empagae	sda	5 klp	50.000.000	sda
	Bantuan Mesin Jahit	Kel.Sidenreng,Kec.Watang Sidenreng	sda	5 klp	50.000.000	sda

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Bantuan Alat Pembengkelan	Kel.Sidenreng,Kec.Watang Sidenreng	sda	5 klp	50.000.000	sda
	Bantuan Alat Pertukangan	Lk.II Walatedong Kel.Sidenreng,Kec.Watang Sidenreng	sda	2 klp	20.000.000	sda
	Pengadaan Mesin Jahit	Lingkungan I, II dan III Kelurahan Ponrangae	sda	3 Kelompok	30.000.000	sda
	Bantuan menjahit Typical dan Pelatihan (UKM) Kelompok AR-RAHMAH	Jalan Belawa Kelurahan Lancirang	sda	5 klp	50.000.000	sda
	<b>Kegiatan Workshop pengembangan usaha mikro dan kecil melalui inovasi desain dan kemasan</b>					
	Pelatihan Pengelolaan Kemasan	Kec. Pitu Riawa		15 Kelompok	150.000.000	Hasil Musrembang tahun 2019
	<b>Kegiatan Pembangunan rumah kemasan</b>					
	Pengadaan Rumah Kemasan dan Pusat Oleh-oleh	Kec. Pitu Riawa		1 unit	100.000.000	Hasil Musrembang tahun 2019

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan Nasional Lima Tahun ( Jangka Menengah ) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan, yaitu APBN Awal dan APBN Perubahan. Dalam setiap penetapan APBN telah tertuang didalamnya berbagai Program lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia telah memproyeksikan program serta mengakomodir usulan-usulan dari Daerah kemudian dirumuskan menjadi Program Nasional melalui Rakornas yang dilaksanakan setiap tahun. Program yang pernah dialokasikan di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu bantuan sarana dan prasarana Pesantren, Bansos terhadap Koperasi Wanita, Dana Bergulir, Bansos Gapoktan, dan Bantuan Sertifikasi tanah bagi UMKM, Sedangkan Program pada tingkat Provinsi hanya bersifat pembinaan (non fisik), bentuk pelatihan manajerial terhadap Koperasi dan bantuan legalitas Koperasi melalui Akta Notaris serta pelatihan wirausaha baru sebagai wujud peningkatan wawasan terhadap UMKM.

#### **III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi**

Tujuan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 - 2018 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Bupati dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur sebagai wujud pelaksanaan perencanaan.

- a. Tujuan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :
  - 1). Menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
  - 2). Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan koperasi dan UMKM.

- 3). Mengembangkan Kawasan Industri dan Infrastruktur pemasaran
- b. Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi dan UMKM demi mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :
- 1). Meningkatnya nilai produksi masing-masing sektor perekonomian.
  - 2). Meningkatnya sharing sektor industri pengolahan dan jasa dalam struktur PDRB.
  - 3). Meningkatnya jumlah UMKM aktif dan produktif.
  - 4). Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM dan koperasi berbasis pertanian.
  - 5). Meningkatnya akses pemasaran bagi produk-produk UMKM.
  - 6). Berkembangnya dukungan lembaga keuangan dan perbankan untuk UMKM.
- c. Indikator Sasaran Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai Cakupan perlindungan konsumen, peningkatan daya saing UMKM, Peningkatan bina kelompok Pengrajin demi untuk peningkatan jumlah IKM aktif dan produktif, adapun indikator sasarannya sebagai berikut :
- 1). Penguatan dukungan Infrastruktur dan Regulasi serta terciptanya Aglomerasi dalam produksi dan Pemasaran.
  - 2). Peningkatan jumlah UMKM baru dan Peningkatan kapasitas UMKM yang telah ada.
  - 3). Penguatan Dukungan akses Permodalan dan Pemasaran Produk-Produk UMKM.
  - 4). Penguatan dukungan layanan pinjaman investasi yang menarik bagi investor serta kerjasama Penelitian dan Pengembangan.
  - 5). Peningkatan kompetensi Tenaga kerja yang dapat bersaing dan mandiri mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal.

### **III.3. Program dan Kegiatan**

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2020 memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Program Pelayanan Admisnitirasi Perkantoran**

- 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2). Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah



- 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 8). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 9). Pelayanan Administrasi Perkantoran

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**

- 1). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 3). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 4). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 5). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 6). Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

**c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

**d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi :**

- 1). Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- 2). Pembinaan/bimbingan teknis laporan keuangan koperasi dan pelaksanaan RAT
- 3). Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

**e. Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah**

- 1). Workshop pengembangan usaha mikro dan kecil melalui inovasi desain dan kemasan
- 2). Penciptaan usaha baru dan penghargaan wirausaha
- 3). Peningkatan Sarana produksi UMKM
- 4). Penyelenggaraan promosi produk UMKM
- 5). Reinventarisasi data UMKM
- 6). Pembangunan rumah kemasan

**f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja:**

- 1). Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- 2). Pembangunan Balai Latihan Kerja
- 3). Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

**g. Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan:**

- 1). Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
- 2). Perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan

**h. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**

- 1). Penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
- 2). Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelakum dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- 3). Pelatihan Transmigrasi Lokal
- 4). Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 5). Pembangunan Permukiman Transmigrasi

**Indikator Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li><li>- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</li><li>- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</li><li>- Penyediaan administrasi keuangan</li><li>- Penyediaan jasa kebersihan kantor</li><li>- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li><li>- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li><li>- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</li><li>- Pelayanan administrasi perkantoran</li></ul>	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah daya Listrik yang digunakan (kwh)</li><li>- Jumlah Kendaraan yang diasuransikan</li><li>- Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa perizinan</li><li>- Jumlah dokumen keuangan yang dibuat</li><li>- Jumlah tenaga kebersihan yang digunakan dan lamanya bekerja</li><li>- Jumlah &amp; jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</li><li>- Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilaksanakan</li><li>- Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah yang dilaksanakan</li><li>- Jumlah dokumen perkantoran yang dihasilkan</li></ul>

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan
	<p><b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perlengkapan gedung kantor</li> <li>- Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> </ul>	<p><b>Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)</li> <li>- Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)</li> <li>- Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)</li> <li>- Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg dipelaha- ra rutin/berkala (unit)</li> <li>- Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)</li> <li>- Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)</li> </ul>
	<p><b>Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b></p> <p>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p>	<p><b>Persentase ASN yang memenuhi kriteria kedisiplinan pegawai (%)</b></p> <p>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat (buah)</p>
	<p><b>Program Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi</li> <li>- Pembinaan/bimbingan teknis laporan keuangan kope-rasi dan pelaksanaan RAT</li> <li>- Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi</li> </ul>	<p><b>Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah koperasi yang dibina/ diawasi dalam hal tertib organisasi dan usaha (unit)</li> <li>- Jumlah kop yg dilatih membuat laporan keuangan (unit)</li> <li>- Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang prinsip perkoperasian (orang)</li> </ul>
	<p><b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b></p> <p>Workshop pengembangan usaha mikro dan kecil melalui inovasi desain dan kemasan</p>	<p><b>Persentase UMK terhadap total UMKM (%)</b></p> <p>Jumlah UMKM yang dilatih meningkatkan desain produknya (unit)</p>

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penciptaan usaha baru dan penghar-gaan wira-usaha</li> <li>- Peningkatan Sarana produksi UMKM</li> <li>- Penyelenggaraan promosi produk UMKM</li> <li>- Reinventarisasi data UMKM</li> </ul> <p><b>Program Peningkatan kesempatan kerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</li> <li>- Pembangunan Balai Latihan Kerja</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja</li> </ul> <p><b>Program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja</li> <li>- Perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan</li> </ul> <p><b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi</li> <li>- Penyediaan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi</li> <li>- Pelatihan Transmigrasi Lokal</li> <li>- Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</li> <li>- Pembangunan Permukiman Transmigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WUB yg tercipta (orang)</li> <li>- Jumlah sarana yang diserahkan (unit)</li> <li>- Jumlah pameran yang diikuti</li> <li>- Data UMKM yang akurat (buku)</li> </ul> <p><b>Besaran pencari kerja yang ditempatkan (%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan informasi lowongan kerja (org)</li> <li>- Jumlah perencanaan (buku) BLK yang berdiri (unit)</li> <li>- Jumlah pencari kerja yang dilatih (org)</li> </ul> <p><b>Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan ketenagakerjaan (%)</b></p> <p>Besaran pemeriksaan perusahaan (%)</p> <p>Jumlah tenaga honorer Pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan (orang)</p> <p><b>Persentase transmigrasi swakarsa (%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah transmigran yg terdampak pengembangan melalui peningkatan kerjasama (KK)</li> <li>- Jumlah transmigran yang mendapat bantuan (KK)</li> </ul> <p>Jumlah Warga Transmigrasi Yg dilatih (KK)</p> <p>Jumlah transmigran baru yang tertampung (KK)</p>

Tabel T-C.29  
RANCANGAN RENJA 2020  
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>2.11.01.01</b>	<b>DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>				<b>11.025.500.000</b>				<b>16.747.500.000</b>
	<b>SEKRETARIAT :</b>				<b>1.128.500.000</b>				<b>1.938.500.000</b>
<b>01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)</b>		100%	<b>806.500.000</b>			<b>100%</b>	<b>856.500.000</b>
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	Kab Sidrap			APBD II			
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah daya Listrik yang digunakan (kwh)	Kab Sidrap	30.000	50.000.000	APBD II		30.000	50.000.000
01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Jumlah Kendaraan yang diasuransikan	Kab Sidrap	1	5.000.000	APBD II		1	5.000.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa perizinan	Kab Sidrap	11	7.000.000	APBD II		11	7.000.000
01.07	Penyediaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang dibuat	Kab Sidrap	200	140.000.000	APBD II		200	140.000.000
01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang digunakan dan lamanya bekerja	Pangkajene Sidenreng	48	40.000.000	APBD II		36	40.000.000
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah & jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pangkajene Sidenreng	45	2.000.000	APBD II		45	2.000.000
01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilaksanakan	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	50	250.000.000	APBD II		60	300.000.000
01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah yang dilaksanakan	Dalam Kab. Sidrap	250	12.500.000	APBD II		250	12.500.000
01.20	Pelayanan Adminsitration Perkantoran	Jumlah dokumen perkantoran yang dihasilkan	Pangkajene Sidenreng	150	300.000.000	APBD II		150	300.000.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)</b>		100%	<b>292.000.000</b>			100%	<b>1.002.000.000</b>
02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan (unit)	Pangkajene Sidenreng	1	50.000.000	APBD II		6	825.000.000
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	Pangkajene Sidenreng	2	20.000.000	APBD II		2	20.000.000
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	Pangkajene Sidenreng	5	50.000.000	APBD II		3	30.000.000
02.10	Pengadaan meubiler	Jumlah dan meubiler yang diadakan (unit)	Pangkajene Sidenreng	10	50.000.000	APBD II			
02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	Pangkajene Sidenreng	1	52.000.000	APBD II		1	52.000.000
02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg dipelihara rutin/berkala (unit)	Pangkajene Sidenreng	12	52.000.000	APBD II		12	55.000.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	Pangkajene Sidenreng	15	7.500.000	APBD II		15	7.500.000
02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit)	Pangkajene Sidenreng	17	10.500.000	APBD II		22	12.500.000
<b>03.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang memenuhi kriteria kedisiplinan pegawai (%)</b>		95%	-	APBD II		98%	<b>50.000.000</b>
03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian seragam dinas dan perlengkapannya yang diadakan (setel)	Pangkajene Sidenreng	0	-	APBD II		40	20.000.000
03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan (setel)	Pangkajene Sidenreng	0	-	APBD II		40	30.000.000
<b>06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase capaian kinerja keuangan (%)</b>		100%	<b>30.000.000</b>			100%	<b>30.000.000</b>
06.01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat (buah)	Pangkajene Sidenreng	4	30.000.000	APBD II		4	30.000.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BIDANG KOPERASI</b>				<b>300.000.000</b>				<b>300.000.000</b>
<b>18.</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi</b>	<b>Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (%)</b>		<b>10%</b>	<b>300.000.000</b>			11%	<b>300.000.000</b>
18.02	Pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang dibina/diawasi dalam hal tertib organisasi dan usaha (unit)	Kab Sidrap	40	110.000.000	APBD II		42	110.000.000
18.01	Pembinaan/bimbingan teknis laporan keuangan koperasi dan pelaksanaan RAT	Jumlah kop yg dilatih membuat laporan keuangan (unit)	Kab Sidrap	20	70.000.000	APBD II		20	70.000.000
18.03	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang prinsip perkoperasian (orang)	Kab Sidrap	120	120.000.000	APBD II		120	120.000.000
	<b>BIDANG UMKM :</b>				<b>4.690.000.000</b>				<b>4.395.000.000</b>
<b>16</b>	<b>Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Persentase UMK terhadap total UMKM (%)</b>		<b>93%</b>	<b>4.690.000.000</b>			91%	<b>4.395.000.000</b>
16.04	Workshop pengembangan usaha mikro dan kecil melalui inovasi desain dan kemasan	Jumlah UMKM yang dilatih meningkatkan desain produknya (unit)	Sidrap	20	20.000.000	APBD II		25	25.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.01	Pembangunan rumah kemas	Jumlah Rumah kemas dan perlengkapannya yang terwujud (unit)	Sidrap	1	300.000.000	APBD II		1	100.000.000
16.03	Penciptaan usaha baru dan penghargaan wira-usaha	WUB yg tercipta (orang)	Sidrap	330	1.100.000.000	APBD II		330	1.100.000.000
16.05	Peningkatan Sarana produksi UMKM	Jumlah sarana yang diserahkan (unit)	Sidrap	700	3.000.000.000	APBD II		700	3.000.000.000
16.06	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah pameran yang diikuti	regional/nasiona I	1	70.000.000	APBD II		1	70.000.000
16.02	Reinventarisasi data UMKM	Data UMKM yang akurat (buku)	Sidrap	1	200.000.000	APBD II		1	100.000.000
	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>3.157.000.000</b>				<b>8.264.000.000</b>
<b>16</b>	<b>Program Peningkatan kesempatan kerja</b>	<b>Besaran pencari kerja yang ditempatkan (%)</b>		<b>62,50%</b>	<b>2.300.000.000</b>			70,80%	<b>7.400.000.000</b>
16.01	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan informasi lowongan kerja (org)	Sidrap	450	200.000.000	APBD II		495	100.000.000
16.02	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Jumlah perencanaan (buku) BLK yang berdiri (unit)	Sidrap	1 buku	100.000.000	APBD II		1	5.000.000.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
16.03	Pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja bagi	Jumlah pencari kerja yang dilatih (org)	Sidrap	1000	2.000.000.000	APBD II		1.200	2.300.000.000
<b>17</b>	<b>Program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan</b>	<b>Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan ketenagakerjaan (%)</b>	<b>Sidrap</b>	<b>90,90%</b>	<b>857.000.000</b>			94,80%	<b>864.000.000</b>
17.01	Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja	Besaran pemeriksaan perusahaan (%)	Sidrap	46%	57.000.000	APBD II		60	59.000.000
17.02	Perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga honorer Pemda yang asuransi ketenagakerjaan (orang)	Sidrap	4.900	800.000.000	APBD II		4.950	805.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bidang Transmigrasi</b>				<b>1.750.000.000</b>				<b>1.850.000.000</b>
15.03	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	<b>Persentase transmigrasi swakarsa (%)</b>		<b>11,1%</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>APBD II</b>		<b>23,90%</b>	<b>1.850.000.000</b>
15.04	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah transmigran yg terdampak pengembangan melalui peningkatan kerjasama (KK)	Kec. Pitu Riase	100	300.000.000	APBD II		50	250.000.000
15.05	Penyediaan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang mendapat bantuan (KK)	Kec. Pitu Riase	175	350.000.000	APBD II		50	200.000.000
15.02	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah Warga Transmigrasi Yang dilatih (KK)	Kec. Pitu Riase	50	100.000.000	APBD II		100	200.000.000
15.01	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen perencanaan yg terwujud (buah)	Kec. Pitu Riase	3	400.000.000	APBD II		3	400.000.000
15.03	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Jumlah transmigran baru yang tertampung (KK)	Kec. Pitu Riase	175	600.000.000	APBD II		300	800.000.000

## BAB IV

### P E N U T U P

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Referensi (Undang-Undang/Peraturan), Renstra, dan keterpaduan Top Down Planning (Konsultatif) dan Bottom Up Planning (Definitif) melalui Musrenbang dan Kebutuhan Organisasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang serta menselaraskan dan mensinerjikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan perlu mendapat perhatian khusus jika sekiranya ketersediaan anggaran cukup demi untuk pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2019.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 23 Agustus 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,  
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



*Safari Renata*

**SAFARI RENATA, S.I.P.M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19730306 199202 1 002